

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Desa Bedono

Desa Bedono, Kec. Sayung, Kab. Demak merupakan sebuah desa yang terletak di garis pantai utara Pulau Jawa. Mulai sekitar tahun 1996, desa tersebut mulai terendam air laut, antara 10-30 cm dan terus menerus meluas hingga mencapai ketinggian 2,5 m sehingga menimbulkan abrasi yang sangat meluas<sup>1</sup>.

Desa Bedono termasuk daerah Sayung, Demak yang wilayah Jawa Tengah dengan luas Desa Bedono 482,8 Ha. Ketebalan populasi telah menghubungi lebih dari 3,279 orang. Penduduk laki-laki tersebut terdiri dari 1.639 penduduk laki-laki dan 1.640 penduduk perempuan. Namun, wilayah yang sangat besar dengan potensi tersebut kini bergantung pada lahan bekas, yaitu sekitar 90% wilayah Desa Bedono. Topografi Wilayah Desa Bedono, Kec. Sayung berada di Barat Kab. Demak, Wilayah Jawa Tengah<sup>2</sup>.

Jarak ke ibu kota wilayah. sejauh 3 km karena berada di ibu kota daerah. Sayung membutuhkan waktu 15 menit, jarak menuju ibu kota daerah. (Demak) sejauh 20 km dengan musim pergerakan hampir satu jam, jarak ke ibu kota biasa. Jawa Tengah.

#### 2. Visi dan Misi Desa Bedono

##### a. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, disusun dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan modal dasar pembangunan yaitu sebagai berikut:

“MELAYANI MASYARAKAT DESA SECARA  
MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA DESA  
YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”.

##### b. Misi

1. “Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.

---

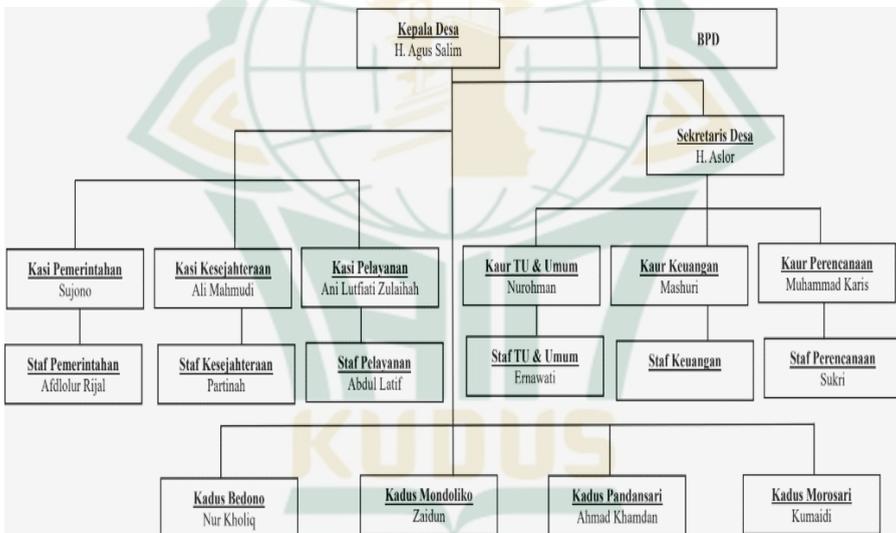
<sup>1</sup> “Desa Bedono” (Kabupaten Demak, n.d.), <http://www.bedono.desa.id/about-us>.

<sup>2</sup> “Geografis Desa Bedono” (Kabupaten Demak, n.d.), <http://www.bedono.desa.id/geografis>.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Bedono**



## B. Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Program Desa Anti Politik Uang di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

#### a. Launching Program Desa Anti Politik Uang di Desa Bedono

Berdasarkan hasil wawancara tentang implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak bahwa desa Bedono dengan diluncurkan menjadi desa anti politik uang oleh Bawaslu kabupaten demak melalui kegiatan diawali dengan rapat koordinasi Desa Pengawasan (Dawas) dan Desa Anti Politik Uang (Dapu). Pelaksanaan desa anti politik uang di desa

Bedono bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang.

#### Gambar 4.2 Launching desa anti politik uang desa Bedono



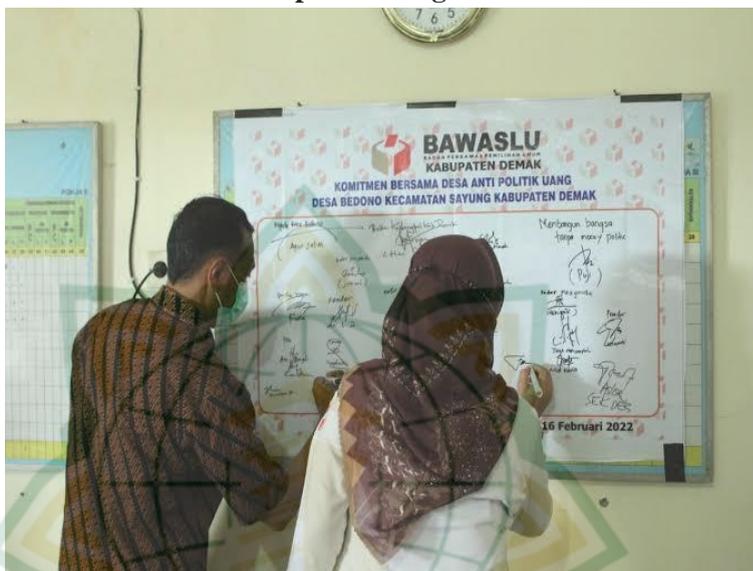
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim mengenai peserta rapat bersama Bawaslu kabupaten Demak bahwa:

“Dalam kegiatan rapat bersama dengan Bawaslu mengenai komitmen desa anti politik uang dengan pemerintah desa Bedono, peserta yang hadir dalam rapat dawas dan dapu dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kesbangpol. Yang hadir dalam rapat juga menandatangani komitmen bersama desa anti politik uang.”<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim bahwa launchingnya desa anti politik uang di desa Bedono dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kesbangpol. Dalam rapat bersama tersebut juga ada penandatanganan komitmen desa anti politik uang bersama desa Bedono oleh peserta yang hadir dalam rapat.

<sup>3</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

**Gambar 4.3 Penandatanganan komitmen bersama desa anti politik uang**



Bapak H. Aslor juga menyampaikan siapa saja peserta yang datang dalam rapat, yaitu:

“Dalam kegiatan launching desa anti politik uang di desa Bedono dihadiri oleh sejumlah perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Rt, Rt setempat.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara dengan bapak H. Aslor menyampaikan bahwa kegiatan launching desa anti politik uang di desa Bedono dihadiri oleh perangkat desa Bedono, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW setempat. Dari penjelasan bapak H. Agus Salim dan bapak H. Aslor dapat disimpulkan bahwa peserta yang hadir dalam rapat bersama Bawaslu mengenai desa anti politik uang adalah perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat desa Bedono, kesbangpol, dan RT RW desa Bedono.

Dalam melaunchingkan desa anti politik uang di desa Bedono Bawaslu kabupaten Demak mempunyai tujuan. Tujuan tersebut dijelaskan oleh bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH., bahwa:

“Kita melaunchingkan desa anti politik uang memiliki tujuan yaitu Menjalankan Program Dari Bawaslu RI Untuk Membentuk Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang. Menginformasikan kepada masyarakat

<sup>4</sup> H. Aslor, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

khususnya warga desa bedono Kecamatan sayung yang ditunjuk oleh Bawaslu Kabupaten Demak untuk menjadi ikon desa pengawasan. Mengajak Masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengawasi dan menolak politik uang.”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Khoiril Saleh, S.Sos., MH., menyampaikan bahwa tujuan kegiatan desa anti politik uang yaitu Menjalankan Program Dari Bawaslu RI Untuk Membentuk Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang. Menginformasikan kepada masyarakat khususnya warga desa bedono Kecamatan sayung yang ditunjuk oleh Bawaslu Kabupaten Demak untuk menjadi ikon desa pengawasan. Mengajak Masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengawasi dan menolak politik uang.

#### **b. Edukasi Bahaya Politik Uang**

Program desa anti politik uang di desa Bedono dari penjelasan bapak H. Agus dilakukan dengan program yaitu:

“Program desa anti politik uang itu kan program bawaslu yang dilakukan di desa. Jadi desa anti politik uang di desa Bedono program nya ada edukasi ke Masyarakat, pembinaan, diskusi kepada Masyarakat. edukasi ke Masyarakat dilakukan ke tokoh-tokoh Masyarakat agar di edukasikan ke Masyarakat lain. Selain itu, edukasi juga dilakukan di forum-forum rapat desa. Pembinaan dilakukan saat launching menjadi desa anti politik uang. diskusi ini dilakukan pemerintah desa dan Masyarakat agar timbul pemikiran sadar bahaya politik uang.”<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim bahwa program desa anti politik uang dari bawaslu yang dijalankan di desa. Program-program desa anti politik uang di desa bedono di implementasikan dengan program edukasi, pembinaan, dan diskusi. Program edukasi di desa Bedono dilakukan ke Masyarakat desa. Selain itu, edukasi dilakukan di forum-forum rapat desa. Pembinaan dilaksanakan saat bawaslu meluncurkan desa anti politik uang. Dan diskusi dilakukan pemerintah desa dan Masyarakat yang membahas mengenai bahaya politik uang agar timbul pemikiran bahaya politik uang.

---

<sup>5</sup> Khoiril Saleh, S.Sos., MH., Wawancara oleh penulis, 12 Juli 2023, wawancara, transkrip

<sup>6</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

Desa anti politik uang menurut bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH. yang beliau sampaikan bahwa:

“Jadi, Bawaslu termasuk Bawaslu Kabupaten Demak itu punya program yang namanya desa anti politik uang dan desa pengawasan. Ini adalah bagian dari edukasi yang dilakukan Bawaslu kepada desa yang ada di Kabupaten Demak. Pertama, kita ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat di desa itu. Kedua, kita ingin mengedukasi pada masyarakat pentingnya untuk diberikan kesadaran pada warganya bahaya adanya politik uang karena bahaya politik uang yaitu: 1. Bisa merusak nilai-nilai demokrasi, 2. Ketika memilih pemimpinnya dengan cara yang tidak baik itu menjadi pemimpin yang tidak amanah, 3. Tentu orang yang prosesnya dihasilkan dari proses yang tidak baik maka Ketika diberikan Amanah jangan berharap hasilnya bisa maksimal.”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH. bahwa desa anti politik uang dan desa pengawasan merupakan program Bawaslu yang termasuk salah satu program dari Bawaslu kabupaten Demak. Program desa anti politik uang ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat desa yang ada di kabupaten Demak dari Bawaslu kabupaten Demak. Hal tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat di desa. Kemudian, mengedukasi pada masyarakat pentingnya untuk diberikan kesadaran pada warganya bahaya adanya politik uang. Bahaya politik uang tersebut yaitu: Bisa merusak nilai-nilai demokrasi, Ketika memilih pemimpinnya dengan cara yang tidak baik itu menjadi pemimpin yang tidak amanah, Tentu orang yang prosesnya dihasilkan dari proses yang tidak baik maka Ketika diberikan Amanah jangan berharap hasilnya bisa maksimal. Tentunya masyarakat tidak akan begitu peduli terhadap bagaimana memajukan daerahnya, bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya tapi orientasinya bagaimana bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.

Bapak H. Agus Salim selaku kepala desa menjelaskan mengenai launching desa anti politik uang bahwa:

---

<sup>7</sup> Khoirul Saleh, S.Sos., MH., Wawancara oleh penulis, 12 Juli 2023, wawancara, transkrip

“Desa ini launching itu tahun 2022. Saat launching itu dihimbau bawaslu mengenai politik uang. dalam rapat launching bawaslu menghimbau kepada Masyarakat agar paham akan bahaya politik uang dalam sebuah Pemilu.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim bahwa desa anti politik uang di desa Bedono launching pada tahun 2022. Dalam rapat launching desa anti politik uang, bawaslu kabupaten Demak menghimbau kepada Masyarakat agar paham bahaya politik uang dalam pemilu. Bawaslu kabupaten Demak melaunchingkan desa anti politik uang di desa Bedono pada tahun 2022. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH., selaku ketua Bawaslu kabupaten Demak bahwa:

“Kalau desa Bedono itu baru yaitu tahun 2022. Desa Bedono itu desa yang terdampak rob dan kondisi masyarakatnya memang seperti itu. Dengan kehadiran kita motivasi mereka supaya semangat bermasyarakat, semangat berusahanya itu tetep baik. Kita juga ingin menyampaikan meskipun kondisinya sedang terpuruk sebisa mungkin tidak akan tergodas dengan politik uang. Kita ingin desa yang kondisinya seperti itu kita lakukan Kerjasama perencanaan desa anti politik uang dan antusias masyarakatnya tinggi, perangkat desanya juga menyambut dengan antusias. Mereka juga bilang kondisinya seperti itu dan nanti bisa diberikan edukasi masyarakatnya.”<sup>9</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH., bahwa desa Bedono diluncurkan oleh Bawaslu kabupaten Demak pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2022. Desa Bedono merupakan salah satu desa yang terdampak banjir rob. Dengan kehadiran Bawaslu di desa Bedono untuk memberi motivasi masyarakat agar semangat bermasyarakat, semangat usahanya tetap baik. Bawaslu ingin menyampaikan tentang politik uang meskipun kondisi masyarakatnya terpuruk agar sebisa mungkin tidak tergodas dengan politik uang. Pihak Bawaslu ingin melakukan Kerjasama perencanaan desa anti politik uang meskipun keadaan masyarakatnya sedang

---

<sup>8</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

<sup>9</sup> Khoirul Saleh, S.Sos., MH., Wawancara oleh penulis, 12 Juli 2023, wawancara, transkrip

terdampak rob dan antusias masyarakatnya tinggi, kemudian perangkat desa juga menyambut dengan antusias. Meskipun kondisi desa seperti itu nantinya diberi edukasi.

Menurut bapak H. Aslor selaku Sekretaris desa Bedono juga menyampaikan bahwa:

“Pembinaan dilakukan kepada masyarakat setempat saat diluncurkan. Edukasi terhadap masyarakat dilakukan diforum-forum saat ada rapat khusus di desa Bedono. Namun juga politik uang dibantah oleh masyarakat intinya pihak desa sudah melakukan edukasi. Perlu dihindari kepada peserta yang hadir dalam rapat agar menyebarkan hasil rapat desa anti politik uang kepada warga yang lain, sehingga masyarakat paham akan bahaya politik uang dalam sebuah Pemilu.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan bapak H. Aslor bahwa saat diluncurkan menjadi desa anti politik uang di desa Bedono, masyarakat diberi binaan mengenai politik uang oleh Bawaslu. Selain itu, di forum-forum rapat yang khususnya di desa bedono diberikan edukasi. Dalam forum rapat juga dihindari kepada peserta yang hadir dalam rapat agar menyebarkan hasil rapat desa anti politik uang kepada warga yang lain, sehingga masyarakat paham akan bahaya politik uang dalam sebuah Pemilu.

Edukasi dilakukan ke Masyarakat seperti yang dijelaskan oleh bapak H. Aslor bahwa:

“Kita kan melakukan edukasi itu ke masyarakat, kita ingin dengan launching dari bawaslu yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di kumpulkan dan diedukasi kemudian kita lakukan diskusi dan pasca itu kegiatan-kegiatan kita itu kita undang perwakilan dari mereka bisa pemudanya, bisa dari pemerintahnya ini kita undang tapi tidak banyak. Pihak desa menjalankan program desa anti politik uang disesuaikan dengan arahan dan program dari Bawaslu.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan bapak H. Aslor bahwa launching dari Bawaslu kabupaten demak menyampaikan pelaksanaan desa anti politik uang di desa Bedono dengan

---

<sup>10</sup> H. Aslor, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

<sup>11</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

menedukasi masyarakat. Edukasi dilakukan ke beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dikumpulkan untuk diberi edukasi. Setelah itu, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir ini diajak untuk diskusi. Kemudian, pihak pemerintah desa Bedono menjalankan program desa anti politik uang yang sesuai dengan arahan Bawaslu kabupaten Demak.

Pemerintah desa Bedono sudah menghimbau agar tidak tergiur oleh politik uang kepada masyarakat. hal tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh bapak H. Agus Salim bahwa:

“Kita tidak bisa melarang masyarakat untuk menolak politik uang, namun selalu memberi himbauan kepada masyarakat meskipun ada masyarakat ada yang membantah dan lebih tertarik dengan politik uang jika ada pemilu/pilkades di desa.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak H. Agus Salim bahwa pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk menolak politik uang. Tetapi masyarakat selalu dihimbau agar tidak menerima politik uang. Meskipun begitu masyarakat ada yang membantah, mereka lebih tertarik untuk menerima politik uang saat diselenggarakan pemilu/pilkades.

Kemudian, setelah Bawaslu kabupaten Demak melaunchingkan desa anti politik uang di desa Bedono masyarakat lebih sadar akan bahaya politik uang. Menurut salah satu tokoh pemuda di desa Bedono yaitu adanya komitmen desa anti politik uang masyarakat sadar. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Bambang selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Menurut saya setelah ada desa anti politik uang, masyarakat desa lebih sadar akan bahaya politik uang. beberapa dari mereka mungkin tidak mau mencoblos jika tidak ada uangnya, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut.”<sup>13</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh bapak Bambang bahwa setelah dilaunchingkan menjadi desa anti politik uang, masyarakat desa Bedono sudah ada yang sadar akan bahaya politik uang. Selain itu, masih ada masyarakat

---

<sup>12</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

<sup>13</sup> Bambang, Wawancara oleh penulis, 16 Juli 2023, wawancara, transkrip

yang jika dalam pemilu tidak ada uangnya maka tidak mau mencoblos.

Kemudian, bapak H. Agus Salim menjelaskan mengenai kesadaran bahaya politik uang bahwa:

“Kesadaran bahaya politik uang itu dari diri sendiri dulu, kenapa hanya karena uang kita sampai rela-rela kita yang punya hak kita harus kalah dengan dengan politik uang. Jadi harus sering edukasi karena kalau di daerah itu melihatnya medsosnya jarang kecuali memang anak-anak muda yang mungkin sudah terbuka pikirannya yang sudah sadar politik. Memang salah satunya program anti politik uang menyadarkan masyarakat karena Bawaslu tidak bisa memaksa tapi kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat supaya kalau kita sering melakukan edukasi pasti akan timbul kesadaran.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim bahwa sadar akan bahaya politik uang kembali ke masing-masing individu, kenapa hanya karena uang dalam politik uang hak pilih tiap individu harus kalah dengan politik uang. Oleh sebab itu, edukasi harus sering dilakukan kepada masyarakat. apabila tidak diberi edukasi, masyarakat yang kurang aktif dalam bersosial media terutama di daerah-daerah terpencil/pinggiran-pinggiran di suatu daerah pasti kurang mendapatkan informasi dari internet. Terkecuali kalau generasi muda saat ini yang mungkin sudah terbuka pikirannya akan sadar politik. maka salah satu adanya program desa anti politik uang dari Bawaslu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya politik uang. Namun Bawaslu tidak bisa memaksa tetapi edukasi selalu dilakukan kepada masyarakat agar timbul kesadaran bahaya politik uang.

Selain itu, bapak Khoirul Saleh, S.Sos., MH., menjelaskan harapan membentuk desa anti politik uang yaitu:

“Membentuk desa pengawasan, desa anti politik uang itu harapannya memberikan pencerahan edukasi pada masyarakat atau pada penyelenggara di pemerintahan itu kita sadarkan, kita ajak diskusi, kita buka wawasannya sehingga ada mindset baru tentang politik uang yang memang harus ditolak dari kondisi yang ada dimasyarakat. Kita berharap juga generasi milenial itu

---

<sup>14</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

sekarang ini kan sudah mulai mereka terbuka wawasannya dan mereka mengetahui dampaknya itu. Kita gencarkan aktivitas edukasi politik ke masyarakat lewat medsos. Ini kan tugas kita kalau misal generasi yang tua itu padangannya masih sebagian seperti itu maka generasi muda kita ubah mindsetnya, paradigmanya sehingga memandang bahwa politik uang musuh besar oleh karena itu bisa kita kikis politik uang itu tidak ada sehingga ketika kontestasi benar-benar nanti orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya visi kedepan bagaimana memajukan desanya, mensejahterakan rakyatnya itu yang diberikan amanat bukan karena mereka mau maju punya uang segini yang lainnya seberapa lebih unggul. Tapi kalau seperti itu desa semuanya tentu tidak akan seperti yang diharapkan maju lebih cepat sejahtera rakyatnya dan kondisi kesehatan, pendidikan terjaga.”<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Khoiril Saleh, S.Sos., MH., menyampaikan bahwa dengan membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang harapannya adalah memberikan pencerahan edukasi masyarakat atau pada penyelenggara di pemerintahan itu di edukasi. Penyelenggara pemilu diajak diskusi, dibuka wawasannya sehingga mindset baru tentang politik uang yang harus ditolak dari kondisi di masyarakat sekitar. Beliau juga berharap generasi milenial yang saat ini sudah ada wawasannya dan mengetahui dampak politik uang. Bawaslu juga gencar edukasi di media sosial. Generasi muda yang mindset nya bagus di edukasi bahwa politik uang menjadi musuh besar dalam pemilu dan kontestasi di pemilu di isi oleh orang-orang berkualitas. Dan orang berkualitas itulah yang mempunyai visi misi untuk mensejahterakan desa yang dipimpin.

Bawaslu kabupaten Demak memiliki alasan memilih desa Bedono sebagai desa anti politik uang. Menurut bapak Khoiril saleh, S.Sos., MH., Bawaslu memilih desa Bedono karena desa yang berada di ujung pesisir. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kita pilih memang desa- desa yang ujung-ujung karena kita ingin membangun demokrasi itu bisa dilakukan dari

---

<sup>15</sup> Khoiril Saleh, S.Sos., MH., Wawancara oleh penulis, 12 Juli 2023, wawancara, transkrip

pinggiran. Kalau masyarakat perkotaan mayoritas rata-rata tingkat SDMnya sudah bagus, pendidikannya sudah bagus. Mereka tentu lebih terbuka terhadap informasi datanya dengan perolehan tentang praktik politik uang tapi bagi masyarakat desa akses informasi itu masih sangat terbatas. Mereka kadang-kadang masih berfikir bahwa itu kan sodaqoh. Kemasan-kemasan itu sebenarnya adalah politik uang tapi dikemasnya itu sodaqoh. Itu adalah kamuflase untuk menutup itu menggunakan jargon-jargon keagamaan. Jadi sodaqoh, serangan fajar, serangan dhuha itu jargon-jargon yang seolah membenarkan apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah tidak baik secara undang-undang, regulasi maupun oleh negara.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Khoiril Saleh, S.Sos., MH., bahwa Bawaslu kabupaten Demak memilih desa Bedono karena salah satu desa yang berada diujung/pesisir. Hal ini karena ingin membangun demokrasi di desa ujung seperti desa Bedono. Kalau masyarakat perkotaan mayoritas rata-rata tingkat SDMnya sudah bagus, pendidikannya sudah bagus. Masyarakat perkotaan tentu lebih terbuka terhadap informasi datanya dengan perolehan tentang praktik politik uang tapi bagi masyarakat desa akses informasi itu masih sangat terbatas. Masyarakat desa berfikir terkadang politik uang adalah sodaqoh. Hal tersebut adalah kamuflase untuk menutup itu menggunakan jargon-jargon keagamaan. Jadi sodaqoh, serangan fajar, serangan dhuha merupakan jargon-jargon yang seolah membenarkan apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah tidak baik secara undang-undang, regulasi maupun oleh negara.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim faktor pendukung dalam program desa anti politik uang di desa Bedono bahwa:

---

<sup>16</sup> Khoiril Saleh, S.Sos., MH., Wawancara oleh penulis, 12 Juli 2023, wawancara, transkrip

“Faktor pendukungnya ya Bawaslu melakukan himbauan dan edukasi masyarakat dengan baik. Di rapat itu banyak ada pemerintah desa, Rt/Rw, tokoh masyarakat meskipun hanya sedikit ya. masyarakat yang tau itu mau mendukung adanya desa anti politik uang. Edukasi-edukasi itu juga sudah dilakukan diforum-forum rapat. Sepertinya beberapa masyarakat itu sudah sadar bahaya politik uang.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Agus Salim faktor pendukung program desa anti politik uang di desa Bedono yaitu

- 1) Bawaslu kabupaten Demak melakukan himbauan dan edukasi bahaya politik uang kepada masyarakat desa Bedono dengan baik.
  - 2) Dalam rapat launching desa anti politik uang bersama Bawaslu dihadiri oleh perangkat desa Bedono, Rt/Rw, dan tokoh masyarakat.
  - 3) Masyarakat mendukung adanya desa anti politik uang di desa Bedono.
  - 4) Edukasi pada masyarakat juga dilakukan di forum-forum rapat desa Bedono.
  - 5) Beberapa masyarakat sudah sadar akan bahaya politik uang.
- b. Faktor Penghambat

Kemudian, bapak H. Agus Salim menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program desa anti politik uang di desa Bedono bahwa:

“Jika faktor penghambat program desa anti politik uang di desa Bedono itu ya masih banyak warga yang menghiraukan desa anti politik uang. Tidak semua masyarakat mendapat edukasi pemerintah desa. Banyak masyarakat yang belum sadar bahaya politik uang. Ekonomi yang lemah membuat terdoda dengan politik uang.”<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan H. Agus Salim menyampaikan bahwa ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan program desa anti politik uang di desa Bedono yaitu

---

<sup>17</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

<sup>18</sup> H. Agus Salim, Wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2023, wawancara, transkrip

- 1) Masih banyak masyarakat yang menghiraukan adanya program desa anti politik uang di desa Bedono.
- 2) Tidak semua masyarakat desa Bedono mendapatkan edukasi dari pemerintah desa.
- 3) Masih banyak masyarakat yang belum sadar bahaya politik uang.
- 4) Faktor ekonomi yang lemah menjadikan masyarakat mudah tergoda dengan politik uang.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Implementasi Program Desa Anti Politik Uang di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

##### a. Launching Desa Anti Politik Uang di Desa Bedono

Secara umum, politik politik uang adalah istilah yang menggambarkan penggunaan uang atau penghargaan lain untuk mempengaruhi individu, kelompok, atau institusi untuk membuat keputusan politik. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan mendefinisikan politik uang sebagai praktik di semua tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang, sehingga menguntungkan salah satu partai atau kandidat atau merugikan pihak lain<sup>19</sup>.

Politik uang dalam pemilu berlangsung dalam berbagai bentuk dan tahapan. Di antaranya, mahar politik pada tahap pencalonan, jual beli suara, dan pemungutan suara pada tahap kampanye. Termasuk juga memberi suap kepada penyelenggara pemilu pada tahap penghitungan dan penghitungan ulang, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu<sup>20</sup>.

Kritik utama terhadap politik uang adalah dampaknya terhadap kedaulatan pengambilan keputusan. Yang seharusnya digadaikan menurut penilaian standar digadaikan karena uang atau imbalan materi lainnya. Misalnya, politik uang dalam bentuk jual beli suara dapat menyebabkan pemilih menggunakan hak pilihnya bukan karena keyakinannya, tetapi karena suaranya telah terbeli<sup>21</sup>.

Masalah lainnya adalah politik uang dapat membuat kontestasi pemilu tidak seimbang dan tidak adil. Suap semacam itu benar-benar mahal dan harus dilakukan dengan uang dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, tidak semua orang memiliki

---

<sup>19</sup> Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik."

<sup>20</sup> Sjafrina, 44.

<sup>21</sup> Sjafrina, 44.

banyak modal. Masalah ini terkait dengan masalah berikutnya, yaitu persaingan elektoral menjadi lebih mahal. Pada titik inilah politik uang dan korupsi politik menemukan titik temu<sup>22</sup>.

Bawaslu sebagai pengawas pemilu terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan pemilu, salah satunya politik uang yang selalu diutamakan Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu selama ini. Perilaku politik uang merupakan penyakit kronis yang harus dikelola bersama. Karena itu Bawaslu merumuskan Program Pengawasan Desa/Kururahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemilu yang bersih dan bermartabat. Oleh sebab itu bawaslu membentuk desa anti politik uang.

Desa anti politik uang adalah wilayah (selanjutnya disebut desa) yang berupaya untuk memantapkan diri sebagai daerah yang siap menolak dan memberantas segala praktik politik uang selama proses penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, pemilihan walikota. Atas dasar itu tentunya menata sumber daya yang ada berdasarkan pemahaman dan kesadaran bahwa adanya politik uang tidak kondusif bagi demokrasi<sup>23</sup>.

Membangun desa anti politik uang adalah langkah awal menuju, secara teori, menghentikan praktik politik uang dalam pemilihan daerah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya Pasal 22D huruf c, Bupati dan Walikota menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi tahapan pengawasan pelaksanaan pemilu, dan Pasal 20 huruf h menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengawasi proses sosialisasi.

Analisis terhadap program desa anti politik uang di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak diimplementasikan dengan deklarasi launching menjadi desa anti politik uang melalui kegiatan diawali dengan rapat koordinasi Desa Pengawasan (Dawas) dan Desa Anti Politik Uang (Dapu). Pelaksanaan desa anti politik uang di desa Bedono bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang.

---

<sup>22</sup> Sjafrina, 44.

<sup>23</sup> Pranata, "Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)," 10.

Menurut penelitian Yuan Febriyanti Alina, Desa Anti Politik Uang (APU) hadir untuk menyadarkan, mengetahui dan memahami secara umum terkait pemilu, pengawasan dan sanksi yang didapat ketika ikut serta dalam praktik politik uang sebagai pelaku atau korban<sup>24</sup>. Maka, dengan hadirnya desa anti politik uang di desa Bedono dapat menyadarkan Masyarakat akan bahaya politik uang melalui launching desa anti politik uang.

Launchingnya desa anti politik uang di desa Bedono dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kesbangpol, tokoh agama, RT RW setempat. Dalam rapat bersama tersebut juga ada penandatanganan komitmen desa anti politik uang bersama desa Bedono oleh peserta yang hadir dalam rapat.

Menurut penelitian Andana Budiyan, kelancaran rencana desa anti politik uang tidak serta merta berasal dari pujian salah satu pihak, namun kontribusi kepala desa juga menjadi salah satu faktor kelancaran rencana tersebut. Kepala desa berperan sebagai penghubung antara Bawaslu dan masyarakat sehingga membantu kelancaran program. Diawali dengan koordinasi oleh Bawaslu kemudian menyusun strategi atau upaya menindaklanjuti rencana yang telah disusun dan memberikan fasilitas yang dapat mendukung masyarakat agar berani menolak politik uang. Masyarakat juga menjadi pemain utama dalam kelancaran rencana desa anti politik uang, karena masyarakat menjadi sasaran utama politik uang pada pemilu. Dengan upaya bersama dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, rencana tersebut akan berhasil<sup>25</sup>. Begitu pula dengan desa anti politik uang di desa Bedono yang berkontribusi dalam launching desa anti politik uang tidak hanya pemerintah desa dan Bawaslu kabupaten Demak, namun juga tokoh-tokoh Masyarakat sebagai perwakilan dalam kegiatan launching tersebut.

Tujuan diluncurkan desa anti politik uang di desa Bedono yaitu:

- a) Menjalankan Program Dari Bawaslu RI Untuk Membentuk Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang.

---

<sup>24</sup> Alina, "Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang," 154.

<sup>25</sup> Budiyan, "Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah," 7.

- b) Menginformasikan kepada masyarakat khususnya warga desa bedono Kecamatan sayung yang ditunjuk oleh Bawaslu Kabupaten Demak untuk menjadi ikon desa pengawasan.
  - c) Mengajak Masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengawasi dan menolak politik uang.
- b. Edukasi Bahaya Politik Uang

Desa anti politik uang dari bawaslu yang dijalankan di desa. Program-program desa anti politik uang di desa bedono di implementasikan dengan program edukasi, pembinaan, dan diskusi. Program edukasi di desa Bedono dilakukan ke Masyarakat desa. Selain itu, edukasi dilakukan di forum-forum rapat desa. Pembinaan dilaksanakan saat bawaslu melaunchingkan desa anti politik uang. Dan diskusi dilakukan pemerintah desa dan Masyarakat yang membahas mengenai bahaya politik uang agar timbul pemikiran bahaya politik uang.

Menurut Anisa Destyana Sasabilla dan Nur Hidayat Sardini, sebagai pemrakarsa dan pelaksana, Bawaslu berkomitmen kuat untuk melaksanakan rencana desa anti politik uang. Secara undang-undang, Bawaslu bertugas mencegah terjadinya penyimpangan pemilu, salah satunya adalah praktik politik uang pada pemilu. Dalam hal pengawasan, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penerapan kebijakan program yang baik melibatkan banyak aktor. Implementasi program pedesaan anti politik uang memerlukan dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sumber daya manusia juga harus ditentukan siapa saja yang akan mengikuti program desa anti politik uang sebelum berkomunikasi dengan pemangku kepentingan<sup>26</sup>. Begitupula, program desa anti politik uang di desa Bedono yang juga diimplementasikan dengan beberapa program yaitu program edukasi, pembinaan, dan diskusi dengan dijalankan oleh pemerintah desa kepada Masyarakat melalui program tersebut dari bawaslu kabupaten Demak.

Desa anti politik uang dan desa pengawasan merupakan program Bawaslu yang termasuk salah satu program dari Bawaslu kabupaten Demak. Program desa anti politik uang ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat desa yang ada di kabupaten Demak dari Bawaslu kabupaten Demak. Hal

---

<sup>26</sup> Sasabilla and Sardini, "Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang)."

tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat di desa. Kemudian, mengedukasi pada masyarakat pentingnya untuk diberikan kesadaran padaarganya bahaya adanya politik uang. Bahaya politik uang tersebut yaitu: Bisa merusak nilai-nilai demokrasi, Ketika memilih pemimpinnya dengan cara yang tidak baik itu menjadi pemimpin yang tidak amanah, Tentu orang yang prosesnya dihasilkan dari proses yang tidak baik maka Ketika diberikan Amanah jangan berharap hasilnya bisa maksimal. Tentunya masyarakat tidak akan begitu peduli terhadap bagaimana memajukan daerahnya, bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya tapi orientasinya bagaimana bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.

Menurut penelitian Agus Riwanto dkk, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Terobosan inovatif Bawaslu menyikapi peraturan tersebut melalui pembentukan gerakan sosial berbasis desa/jalanan bernama Desa Anti Politik Uang yang melibatkan banyak elemen desa melalui pengawasan partisipatif. Anti politik uang model desa yang memanfaatkan modal sosial masyarakat yang ada merupakan strategi yang dapat digunakan Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang dalam pemilukada. Gerakan sosial pedesaan anti politik uang merupakan strategi untuk menekan praktik politik uang pedesaan<sup>27</sup>. Begitu pula, dengan desa anti politik uang di kabupaten Demak, terutama di desa Bedono yang menjalankan program desa anti politik uang dengan mengedukasi Masyarakat dan juga menanamkan nilai-nilai demokrasi agar Masyarakat sadar bahaya politik uang sesuai dengan Undang-Undang.

Dasar Hukum dalam pembentukan desa anti politik uang ada enam yaitu:

1. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

---

<sup>27</sup> Riwanto et al., “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang,” 286.

3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2018;
6. Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.”

Desa anti politik uang di desa Bedono launching pada tahun 2022 oleh bawaslu kabupaten Demak. Dalam rapat launching desa anti politik uang, bawaslu kabupaten Demak menghimbau kepada Masyarakat agar paham bahaya politik uang dalam pemilu. Desa Bedono merupakan salah satu desa yang terdampak banjir rob. Dengan kehadiran Bawaslu di desa Bedono untuk memberi motivasi masyarakat agar semangat bermasyarakat, semangat usahanya tetap baik. Bawaslu ingin menyampaikan tentang politik uang meskipun kondisi masyarakatnya terpuruk agar sebisa mungkin tidak tergodanya dengan politik uang. Pihak Bawaslu ingin melakukan Kerjasama perencanaan desa anti politik uang meskipun keadaan masyarakatnya sedang terdampak rob dan antusias masyarakatnya tinggi, kemudian perangkat desa juga menyambut dengan antusias. Meskipun kondisi desa seperti itu nantinya diberi edukasi.

Tantangan terbesar Bawaslu dalam pemilu adalah meminimalisir maraknya politik uang yang dilakukan tim sukses dan calon legislatif. Harus diakui permasalahan politik uang merupakan penyakit kronis yang masih sulit disembuhkan. Meski demikian, Bawaslu tidak putus asa dalam menyikapi isu politik uang dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kegiatan demokrasi yang tidak terpengaruh oleh politik uang. Bawaslu mengajak masyarakat memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan fokus pada visi dan misi, serta rekam jeaknya, bukan pada suap, suap, dan praktik politik berbasis uang lainnya. Penetapan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam membangun kesadaran masyarakat dan memberikan keberanian untuk menolak dan memerangi politik

uang pada Pemilu 2024<sup>28</sup>. Oleh sebab itu, edukasi politik di desa Bedono mengenai politik uang tetap dilakukan meskipun kondisi masyarakatnya yang terdampak bencana. Bawaslu ingin menyampaikan tentang politik uang meskipun kondisi masyarakatnya terpuruk agar sebisa mungkin tidak tergodanya dengan politik uang.

Terkait dengan launching desa anti politik uang di desa Bedono, masyarakat diberi binaan mengenai politik uang oleh Bawaslu. Selain itu, di forum-forum rapat yang khususnya di desa Bedono diberikan edukasi. Dalam forum rapat juga dihimbau kepada peserta yang hadir dalam rapat agar menyebarkan hasil rapat desa anti politik uang kepada warga yang lain, sehingga masyarakat paham akan bahaya politik uang dalam sebuah Pemilu.

Menurut penelitian Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullohi, Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) merupakan gerakan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik terkait politik uang. Gerakan Perdesaan Anti Politik Uang merupakan salah satu bentuk pendidikan politik berbasis konsep *pre-emptif* yang dilakukan oleh desa dan masyarakat. Gerakan tersebut dibentuk dan dicanangkan dengan alasan politik uang seolah sudah menjadi budaya di Indonesia setiap kali pemilu digelar<sup>29</sup>. Begitu pula, dengan desa anti politik uang yang memiliki tujuan, yaitu dengan melakukan pembinaan kepada Masyarakat desa Bedono mengenai politik uang oleh Bawaslu.

Edukasi dilakukan oleh Bawaslu ke beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dikumpulkan untuk diberi edukasi. Setelah itu, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir ini diajak untuk diskusi. Kemudian, pihak pemerintah desa Bedono menjalankan program desa anti politik uang yang sesuai dengan arahan Bawaslu kabupaten Demak agar nantinya bisa disebarkan ke Masyarakat desa. Meskipun pemerintah desa tidak bisa melarang masyarakat untuk menolak politik uang. Tetapi masyarakat selalu dihimbau agar tidak menerima politik uang. Meskipun begitu masyarakat ada yang membantah, mereka lebih tertarik untuk menerima politik uang saat diselenggarakan pemilu/pilkades.

---

<sup>28</sup> Ulin Nuha, "Mencegah Politik Uang Di Pemilu 2024," demak.bawaslu.go.id, 2023, <https://demak.bawaslu.go.id/mencegah-politik-uang-di-pemilu-2024/>.

<sup>29</sup> Pahlevi and Amrullohi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," 145–46.

Menurut Zainal Abidin Rahawarin Darma, faktanya, politik uang merupakan ladang ranjau yang harus dihindari dalam upaya kita meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan nasional di Indonesia. Calon pemimpin rakyat pada pemilu umum atau pilkada harus mengedepankan program, kinerja, dan rekam jejak pribadi agar pemilih dapat memilih pemimpin terbaik. Partai politik yang menjadi wadah rekrutmen calon politik juga harus membangun sistem rekrutmen calon pemimpin yang transparan dan akuntabel agar terhindar dari proses politik yang berbasis uang. Demikian pula penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dapat lebih konsisten menegakkan berbagai ketentuan pemilu secara adil dan transparan, sehingga menghilangkan peluang eksploitasi politik uang dalam segala bentuknya. Tentu saja mencapai kondisi ideal seperti itu merupakan jalan terjal yang harus ditempuh<sup>30</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut, bawaslu kabupaten Demak sebagai badan pengawas perlu menegakkan peraturan dalam pemilu terutama pada Masyarakat desaa yang mudah menerima politik uang yang salah satunya adalah desa Bedono dengan edukasi yang lebih menyeluruh kelapisan Masyarakat.

Setelah diluncurkan menjadi desa anti politik uang, masyarakat desa Bedono sudah ada yang sadar akan bahaya politik uang. Selain itu, masih ada masyarakat yang jika dalam pemilu tidak ada uangnya maka tidak mau mencoblos.

Menurut penelitian Aip Syarifudin, politik uang terjadi karena adanya “kesepakatan” antara pemberi dan penerima. Uang merupakan faktor penting dalam upaya menciptakan keseimbangan demokrasi, namun di sisi lain juga bisa menjadi sebaliknya jika tidak digunakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli dan menjual suara oleh individu yang mencari posisi kekuasaan. Bagi yang mempunyai cukup uang akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan, sedangkan bagi yang tidak mempunyai uang akan melakukan berbagai tindakan ilegal untuk mendapatkan uang. Fenomena di atas memberi gambaran bahwa persoalan politik uang tidak bisa diselesaikan hanya dengan seperangkat aturan saja, namun juga

---

<sup>30</sup> Zainal Abidin Rahawarin Darma, *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 4, [http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.pdf](http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku%20Dinamika%20Politik%20Uang%20dalam%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah.pdf).

harus dibarengi dengan sikap tegas semua pihak, dan hal ini pada hakikatnya bermuara pada persoalan moral, yang sangat berperan dalam hal moralitas yang berperan mencegah perilaku kotor yang lumrah terjadi di dunia politik<sup>31</sup>. Dari penjelasan tersebut, kesadaran Masyarakat desa Bedono akan bahaya politik uang harus ditingkatkan agar politik uang dapat dikurangi mulai dari tingkat desa karena permasalahan politik uang tidak hanya bisa diselesaikan dengan seperangkat aturan yang melingkupinya, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap dari semua lingkup Masyarakat.

Sadar akan bahaya politik uang kembali ke masing-masing individu, kenapa hanya karena uang dalam politik uang hak pilih tiap individu harus kalah dengan politik uang. Oleh sebab itu, edukasi harus sering dilakukan kepada masyarakat. apabila tidak diberi edukasi, masyarakat yang kurang aktif dalam bersosial media terutama di daerah-daerah terpencil/pinggiran-pinggiran di suatu daerah pasti kurang mendapatkan informasi dari internet. Terkecuali kalau generasi muda saat ini yang mungkin sudah terbuka pikirannya akan sadar politik. maka salah satu adanya program desa anti politik uang dari Bawaslu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya politik uang. Namun Bawaslu tidak bisa memaksa tetapi edukasi selalu dilakukan kepada masyarakat agar timbul kesadaran bahaya politik uang.

Menurut penelitian Fitriyah, fenomena praktik politik berbasis uang pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat sendiri, dan kehadiran uang menjadi daya tarik masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap calon tertentu. Saat ini, uang dianggap sebagai media paling efektif untuk mengajak masyarakat dan membimbing massa dalam mengambil pilihan tertentu. Praktik politik uang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, namun masih lumrah hingga saat ini menjelang pemilu. Secara tidak langsung dapat diketahui bahwa praktik politik uang dapat merusak sistem demokrasi yang ada<sup>32</sup>. Dari penjelasan tersebut, edukasi politik uang harus lebih digencarkan di daerah desa. Di desa Bedono, Masyarakat harus meningkatkan kesadarannya karena politik uang dapat

---

<sup>31</sup> Aip Syarifudin, "Pilkada Dan Fenomena Politik Uang; Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya," *Jurnal Keadaan Pemilu 2* (2020): 32.

<sup>32</sup> Fitriyah, "Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada," *Jurnal Ilmu Politik*, no. 32 (2012): 1-10.

merusak nilai-nilai demokrasi dengan edukasi yang diberikan oleh bawaslu kabupaten Demak.

Membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang harapannya adalah memberikan pencerahan edukasi masyarakat atau pada penyelenggara di pemerintahan itu di edukasi. Penyelenggara pemilu diajak diskusi, dibuka wawasannya sehingga mindset baru tentang politik uang yang harus ditolak dari kondisi di masyarakat sekitar. Beliau juga berharap generasi milenial yang saat ini sudah ada wawasannya dan mengetahui dampak politik uang. Bawaslu juga gencar edukasi di media sosial. Generasi muda yang mindset nya bagus di edukasi bahwa politik uang menjadi musuh besar dalam pemilu dan kontestasi di pemilu di isi oleh orang-orang berkualitas. Dan orang berkualitas itulah yang mempunyai visi misi untuk mensejahterakan desa yang dipimpin.

Bawaslu kabupaten Demak memilih desa Bedono karena salah satu desa yang berada diujung/pesisir. Hal ini karena ingin membangun demokrasi di desa ujung seperti desa Bedono. Kalau masyarakat perkotaan mayoritas rata-rata tingkat SDMnya sudah bagus, pendidikannya sudah bagus. Masyarakat perkotaan tentu lebih terbuka terhadap informasi datanya dengan perolehan tentang praktik politik uang tapi bagi masyarakat desa akses informasi itu masih sangat terbatas. Masyarakat desa berfikir terkadang politik uang adalah sodaqoh. Hal tersebut adalah kamufase untuk menutup itu menggunakan jargon-jargon keagamaan. Jadi sodaqoh, serangan fajar, serangan dhuha merupakan jargon-jargon yang seolah membenarkan apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah tidak baik secara undang-undang, regulasi maupun oleh negara.

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan dalam nuansa pemilihan umum di mana peserta pemilu menggunakan kekuatan modal (uang, sembako, dan bentuk lainnya) untuk memberikan harapan kepada calon pemilih untuk memilih, serangan fajar tersebut biasanya terjadi pada situasi berikut Sedang berlangsung: Pemungutan suara akan berlangsung (dari Masa Tenang hingga Malam Pemilihan)<sup>33</sup>. Maka, membangun demokrasi di desa ujung seperti desa Bedono karena salah satu desa yang berada diujung/pesisir yang akses informasi itu masih sangat terbatas. Masyarakat desa berfikir terkadang politik uang

---

<sup>33</sup> Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum," 251.

adalah sodaqoh. Hal tersebut adalah kamuflase untuk menutupi itu menggunakan jargon-jargon keagamaan seperti serangan fajar. Oleh sebab itu, bawaslu kabupaten Demak memilih desa Bedono sebagai desa anti politik uang agar masyarakatnya mudah diedukasi.

## **2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Dalam melakukan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak akan dianalisa berdasarkan hasil penelitian dan teori pendukung.

### **a. Faktor Pendukung**

- 1) Bawaslu kabupaten Demak melakukan himbauan dan edukasi bahaya politik uang kepada masyarakat desa Bedono dengan baik.

Menurut penelitian Hariman Satria, Bawaslu tidak bisa menjadi pengawas tunggal namun harus mampu berintegrasi dengan masyarakat sekitar guna mengantisipasi dan mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya politik uang. Untuk itu, diperlukan pula anggota Komisioner Bawaslu yang dapat menjaga integritasnya agar tidak mudah disuap oleh penjahat demokrasi<sup>34</sup>.

Apa yang telah ditemukan oleh peneliti dari data yang ada, menurut peneliti faktor pendukung bisa dilakukan di desa Bedono karena berdasarkan pendapat Hariman Satria di atas bahwa faktor yang ada dapat dilakukan secara maksimal karena bawaslu kabupaten Demak merupakan badan pemilu yang mampu menyatu dengan lingkungan Masyarakat agar potensi politik uang dapat dicegah.

- 2) Dalam rapat launching desa anti politik uang bersama Bawaslu dihadiri oleh perangkat desa Bedono, Rt/Rw, dan tokoh masyarakat.

Menurut penelitian Ahmad Muqsith dan Nur Imam Subono, untuk menjadi desa anti politik uang berpegang pada pedoman yang telah ditentukan, yaitu: adanya sinergi antara pemangku kepentingan dan masyarakat, yang diwujudkan dalam dukungan aktif masyarakat terhadap

---

<sup>34</sup> Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," 12.

deklarasi desa anti politik uang. Sambutan hangat aparat desa selama proses sosialisasi juga menunjukkan keterbukaan masyarakat terhadap informasi baru (tentang politik uang)<sup>35</sup>.

Apa yang telah ditemukan oleh peneliti dari data yang ada, menurut peneliti faktor pendukung bisa dilakukan di desa Bedono karena berdasarkan pendapat Ahmad Muqsith dan Nur Imam Subono di atas bahwa faktor yang ada dapat dilakukan secara maksimal karena adanya sinergi yang terjalin antara stakeholder dengan masyarakat yang ditandai dengan antusiasme masyarakat dalam mendukung deklarasi desa anti politik uang.

### 3) Masyarakat mendukung adanya desa anti politik uang di desa Bedono.

Menurut penelitian Sri Wahyuni, strategi yang dapat diterapkan Bawaslu untuk mencegah kecurangan pemilukada dan memperkuat demokrasi lokal adalah dengan memberdayakan desa anti politik uang. Pemanfaatan desa sebagai upaya pelibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Melestarikan demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya peraturan atau institusi. Partisipasi masyarakat sangat penting karena dalam pemilukada masyarakatlah yang menjadi aktor utama. Desa merupakan struktur yang paling dekat dengan masyarakat, dan memainkan peran desa serta mewujudkan pilkada yang berintegritas merupakan langkah terbaik<sup>36</sup>.

Apa yang telah ditemukan oleh peneliti dari data yang ada, menurut peneliti faktor pendukung bisa dilakukan di desa Bedono karena berdasarkan pendapat Sri Wahyuni dkk di atas bahwa faktor yang ada dapat dilakukan secara maksimal karena Masyarakat desa memiliki peran sebagai aktor utama dalam pilkada agar Masyarakat dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh sebab itu, Masyarakat desa Bedono mendukung adanya desa anti politik uang.

---

<sup>35</sup> Muqsith and Subono, "Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal," 907.

<sup>36</sup> Sri Wahyuni et al., "Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Untuk Menciptakan Pilkada Berintegritas," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 16–17.

- 4) Edukasi pada masyarakat juga dilakukan di forum-forum rapat desa Bedono.

Menurut penelitian Nur Laela Dian Latifah, fungsi pengawasan akan sangat efektif jika peran masyarakat ikut berperan. Dalam teori demokrasi, peran masyarakat tidak hanya sekedar memilih, namun juga memainkan berbagai peran pengawasan dalam berbagai tahapan pemilu. Peran pengawasan yang dimaksud adalah pencaangan Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) yang sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mencegah politik uang<sup>37</sup>.

Apa yang telah ditemukan oleh peneliti dari data yang ada, menurut peneliti faktor pendukung bisa dilakukan di desa Bedono karena berdasarkan pendapat Nur Laela Dian Latifah di atas bahwa faktor yang ada dapat dilakukan secara maksimal karena masyarakat tidak hanya sebagai pemberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran pengawasan pada seluruh tahapan pemilu. Oleh sebab itu, Masyarakat desa Bedono perlu di edukasi dalam kegiatan desa agar mampu melakukan perannya sebagai Masyarakat dalam terselenggaranya pilkada.

- 5) Beberapa masyarakat sudah sadar akan bahaya politik uang.

Menurut penelitian Fairuz Arta Abhipraya, gerakan untuk melawan praktik politik uang dari kesadaran salah satu masyarakat Desa sudah menjadi langkah awal penting pembentukan Desa anti politik uang. Kesadaran masyarakat mengenai bahaya praktik politik uang di desa masih terbilang relatif rendah. Karena tidak ada jaminan bahwa jika mereka tidak menerima budaya politik uang otomatis aspirasi mereka akan terpenuhi oleh caleg jika terpilih nantinya<sup>38</sup>.

Apa yang telah ditemukan oleh peneliti dari data yang ada, menurut peneliti faktor pendukung bisa dilakukan di desa Bedono namun tidak maksimal karena berdasarkan pendapat Fairuz Arta Abhipraya di atas bahwa faktor yang ada dapat dilakukan kurang maksimal karena hanya beberapa Masyarakat yang sadar bahaya politik uang atau

---

<sup>37</sup> Nur Laela Dian Latifah, "Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY Pada Pemilu Serentak 2019" (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 48–49.

<sup>38</sup> Abhipraya, Sadayi, and Putri, "Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam Melawan Praktik Politik Uang."

kesadaran Masyarakat masih relatif sedikit karena budaya politik uang sulit dihilangkan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih banyak masyarakat yang menghiraukan adanya program desa anti politik uang di desa Bedono.

Tidak adanya struktur pengurus dan program kerja yang jelas sebagaimana tindak lanjut dari pendeklarasian diri sebagai Desa Anti Politik Uang sehingga tanggung jawab dan pengelolaan Desa Anti Politik Uang tidak terstruktur dengan baik seharusnya dengan adanya peraturan yang jelas tersebut bisa di jadikan pedoman pelaksanaan tugas-tugas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka Panjang<sup>39</sup>. Hal ini, dapat disimpulkan Masyarakat desa Bedono menghiraukan desa anti politik uang disebabkan tidak ada peraturan yang jelas mengenai desa anti politik uang.

- 2) Tidak semua masyarakat desa Bedono mendapatkan edukasi dari pemerintah desa.

Menurut Bimo Laksono Mahardika dan Sri Hartini, 4strategi pencegahan desa anti politik aung dilakukan secara kultural yang dimulai dari upaya menyadarkan masyarakat melalui deklarasi Desa Anti Politik Uang serta membentuk tim Desa anti politik uang yang bertugas melakukan literasi politik atau memberikan informasi sosialisasi politik yang berkaitan dengan pemahaman demokrasi di masyarakat<sup>40</sup>.

Hal ini, dapat disimpulkan tidak meratanya edukasi desa anti politik aung di desa Bedono karena tidak ada tim yang bertugas mengedukasi masyarakat

- 3) Masih banyak masyarakat yang belum sadar bahaya politik uang.

Menurut Anjas Setiaji dan Sunarso, Sumber daya manusia yang kurang cerdas atau rendah dalam berfikir tentu saja akan mudah terbujuk dengan adanya iming-iming sebuah hadiah baik berupa uang maupun barang<sup>41</sup>. Hal ini,

---

<sup>39</sup> Bimo Laksono Mahardika and Sri Hartini, "Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilal Umum Kabupaten Terhadap Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo," *Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 11, no. 05 (2022): 591.

<sup>40</sup> Alina, "Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang," 162.

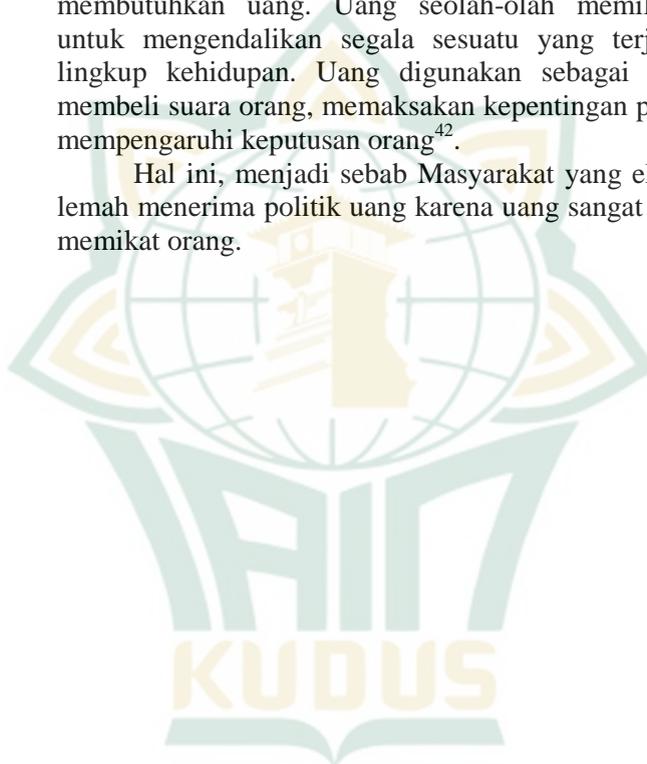
<sup>41</sup> Anjas Setiaji and Sunarso, "Strategi Pemerintah Desa Sardonoarjo Dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum* 10, no. 2 (2021): 197.

membuat Masyarakat desa Bedono banyak yang belum sadar bahaya politik uang.

- 4) Faktor ekonomi yang lemah menjadikan masyarakat mudah tergoda dengan politik uang.

Uang adalah hal yang sangat kuat ketika digunakan untuk memikat orang dengan tujuan tertentu. Karena nyatanya, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak membutuhkan uang. Uang seolah-olah memiliki fungsi untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup kehidupan. Uang digunakan sebagai alat untuk membeli suara orang, memaksakan kepentingan pribadi, dan mempengaruhi keputusan orang<sup>42</sup>.

Hal ini, menjadi sebab Masyarakat yang ekonominya lemah menerima politik uang karena uang sangat kuat untuk memikat orang.



---

<sup>42</sup> Natasya, “Politik Uang: Pengertian, Bentuk Dan Contoh.”